

BAB II
KONTEKS DAN DINAMIKA ADVOKASI GREENPEACE
INTERNASIONAL DI RUSIA

Bab ini bertujuan untuk membangun pemahaman kontekstual mengenai dinamika advokasi Greenpeace International di Rusia. Pemahaman tersebut menjadi penting karena perubahan strategi organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik dan struktur kekuasaan tempat ia beroperasi. Oleh karena itu, sebelum menganalisis transformasi strategi advokasi pasca penghentian operasional Greenpeace Rusia oleh pemerintah Rusia, perlu terlebih dahulu dipahami konteks hubungan antara organisasi ini dan negara tempat ia menjalankan aktivitasnya.

Pembahasan dalam bab ini akan bergerak melalui empat bagian yang saling berkaitan. Pertama, bab ini menguraikan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan transnasional, termasuk karakter, prinsip, serta metode advokasi yang menjadi ciri khasnya di tingkat global. Kedua, akan ditelusuri dinamika kehadiran dan praktik advokasi Greenpeace di Rusia, sebuah negara dengan kecenderungan rezim yang semakin sentralistik dan membatasi ruang masyarakat sipil, serta bagaimana representasi lokalnya, yaitu Greenpeace Rusia, beroperasi dalam konteks tersebut. Ketiga, akan dianalisis mengenai konflik Arktik yaitu isu kunci yang memantik penghentian operasional Greenpeace di Rusia. Dan yang terakhir, akan diuraikan mengenai model strategi advokasi Greenpeace sebelum mendapatkan penghentian operasional di Rusia.

Dengan demikian, Bab II tidak hanya memaparkan latar belakang organisasi dan konteks politik Rusia, tetapi juga menunjukkan bagaimana interaksi antara aktor transnasional dan negara dengan sistem politik kontrol pemerintah yang kuat membentuk dinamika konflik, pembatasan, serta kebutuhan akan adaptasi strategis yang kemudian menjadi dasar bagi pembahasan transformasi advokasi pada bab selanjutnya.

2.1. Greenpeace sebagai Organisasi Lingkungan Transnasional

Greenpeace International merupakan salah satu organisasi non-pemerintah internasional paling berpengaruh dalam membentuk kesadaran global dan agenda internasional terkait isu-isu lingkungan (Riansyah, 2025). Kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya ancaman ekologis lintas batas yang menuntut respons kolektif di tingkat global. Organisasi ini secara resmi didirikan pada tahun 1971 di Vancouver, Kanada, oleh sekelompok aktivis perdamaian dan lingkungan yang menentang uji coba nuklir Amerika Serikat di Kepulauan Amchitka, Alaska (Weyler, 2021; Greenpeace, 2020; Davis & Spong, 2023). Akar gerakan ini telah muncul sejak 1970 melalui Komite *Don't Make a Wave*, yang kemudian melahirkan istilah "*Greenpeace*", yaitu sebuah konsep yang diusulkan oleh Bob Hunter untuk menggabungkan nilai perdamaian dan ekologi. Istilah ini mencerminkan keyakinan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penolakan terhadap kekerasan, militerisme, serta dominasi manusia atas alam (Greenpeace, 2020; Weyler, 2021; Weyler & Kovarik, 2021; Davis & Spong, 2023). Prinsip tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menjadi fondasi

ideologis yang membedakan Greenpeace dari organisasi konservasi lainnya, dengan menempatkan perjuangan ekologis sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan global dan non-kekerasan.



**Gambar 2.1 Komite Don't Make a Wave berfoto di depan kapal Greenpeace pada tahun 1995 dalam aksi protes energi nuklir
Sumber: (Greenpeace, 2019)**

Seiring perkembangannya, Greenpeace mengalami ekspansi yang signifikan baik secara geografis maupun tematik. Hingga saat ini, Greenpeace memiliki kehadiran di 55 negara di berbagai kawasan dunia, dengan koordinasi terpusat oleh Greenpeace Internasional yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda (Greenpeace, 2020). Struktur ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan advokasi di tingkat lokal dan nasional, sekaligus menjaga konsistensi agenda global. Dalam konteks ini, Greenpeace tidak hanya berfungsi sebagai organisasi internasional, tetapi juga sebagai jaringan advokasi transnasional (*transnational advocacy network/TAN*), di mana koordinasi global diterjemahkan ke dalam aksi yang kontekstual di tingkat lokal (Betsill, 2006).

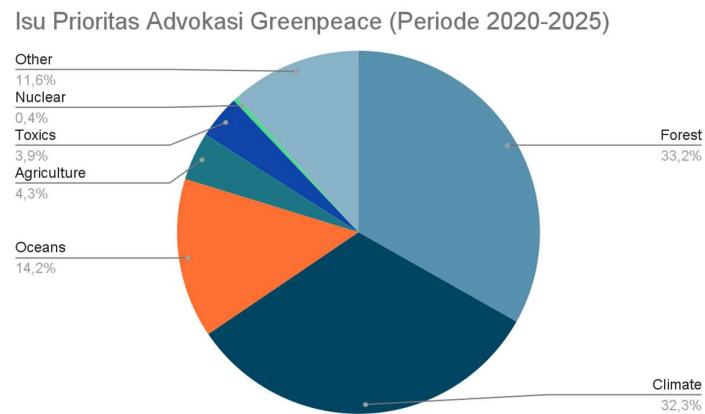


Gambar 2.2 Peta Persebaran Greenpeace
Sumber: (Greenpeace, 2024)

Contoh implementasi mekanisme ini dapat dilihat dalam kampanye global *Save the Arctic*, yang secara strategis dikoordinasikan oleh Greenpeace International dari Amsterdam, namun kemudian diterjemahkan dan disesuaikan oleh Greenpeace Russia dengan fokus pada ancaman eksplorasi energi di Laut Pechora. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Greenpeace Rusia selaras dengan karakter Greenpeace sebagai TAN, di mana esensi transnasionalisme terletak pada koordinasi visi global yang terpusat, namun dieksekusi melalui aksi yang kontekstual dan berakar pada dinamika lokal (Betsill, 2006).

Dalam perkembangan tematiknya, fokus kampanye Greenpeace tidak lagi terbatas pada isu nuklir, tetapi meluas ke berbagai persoalan lingkungan global seperti perubahan iklim, *deforestasi*, pencemaran laut, krisis plastik, hingga transisi energi terbarukan (Greenpeace, 2010). Perluasan ini mencerminkan respons organisasi terhadap dinamika krisis ekologis yang semakin terintegrasi dan lintas sektor (Weyler, 2021; Greenpeace, 2010). Berdasarkan dokumen rencana strategis dan laporan tahunan periode 2020–2025, Greenpeace menetapkan sejumlah fokus prioritas kampanye global yang menjadi pedoman

koordinasi advokasi di berbagai negara. Pada periode tersebut, agenda strategis Greenpeace secara dominan berfokus pada isu perubahan iklim (*climate*) dan perlindungan hutan (*forest*), disertai dengan kampanye terkait perlindungan laut (*oceans*), sistem pangan berkelanjutan, pengurangan polusi plastik, serta percepatan transisi energi bersih dan terbarukan.



Grafik 2.1 Fokus Prioritas Kampanye Global Greenpeace (Periode Strategis 2020–2025)

Sumber: (Diolah kembali oleh penulis dari Greenpeace, 2025)

Kemudian dalam praktiknya, Greenpeace International melakukan koordinasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kampanye tersebut secara global, seperti kampanye terkait perubahan iklim, perlindungan hutan, perlindungan laut, penolakan terhadap energi fosil, serta penghentian praktik komersial yang merusak lingkungan (Britannica, 2025). Kampanye-kampanye ini dirancang secara strategis pada tingkat internasional agar dapat menekan kebijakan dan praktik negara maupun korporasi yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan secara global. Dari situlah ciri khas utama Greenpeace muncul, yang terletak pada pendekatan advokasinya dengan mengkombinasikan

berbagai metode dalam satu strategi kampanye yang terpadu. Sejak aksi awal pelayaran kapal Phyllis Cormack menuju Amchitka pada tahun 1971, Greenpeace menempatkan aksi langsung sebagai instrumen utama untuk menghadirkan realitas kerusakan lingkungan secara konkret kepada publik (Weyler & Kovarik, 2021; Greenpeace, 2020). Aksi-aksi simbolik seperti menghadang kapal penangkap paus, memanjat anjungan pengeboran minyak, membentangkan spanduk di gedung pemerintahan, hingga dokumentasi langsung di lokasi kerusakan lingkungan dirancang sebagai bentuk komunikasi visual yang kuat untuk membangun opini publik, menciptakan tekanan moral, serta mempengaruhi aktor-aktor yang terlibat (Greenpeace, 2020; Weyler & Kovarik, 2021).

Pendekatan aksi langsung tersebut diperkuat oleh basis ilmiah melalui investigasi dan penelitian yang sistematis. Greenpeace secara rutin memproduksi laporan terkait *deforestasi* ilegal, pencemaran bahan kimia, limbah plastik, hingga emisi industri sebagai dasar advokasi kebijakan (Weyler, 2021). Dukungan ini juga diperkuat oleh keberadaan laboratorium riset yang berbasis di University of Exeter, yang secara berkala menghasilkan kajian ilmiah untuk mendukung advokasi lingkungan (Greenpeace, 2025). Kombinasi antara aksi simbolik dan bukti ilmiah memungkinkan Greenpeace membentuk framing isu, mempengaruhi arus informasi, serta menekan pemangku kepentingan melalui berbagai jalur, termasuk kebijakan publik dan diplomasi (Greenpeace, 2020). Selain itu, kekuatan Greenpeace juga ditopang oleh prinsip independensi finansial dan politik. Organisasi ini menolak pendanaan dari pemerintah, partai politik, maupun korporasi, dan bergantung pada donasi individu guna menjaga independensi

dalam menentukan agenda serta mempertahankan sikap kritis terhadap berbagai aktor (Greenpeace, 2019; Greenpeace, 2025). Prinsip ini memperkuat legitimasi Greenpeace sebagai organisasi advokasi yang merepresentasikan kepentingan publik secara luas.

Memasuki era digital, Greenpeace menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan dengan mengintegrasikan teknologi dalam strategi advokasinya. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dokumenter daring, serta kampanye petisi online telah memperluas jangkauan advokasi sekaligus memungkinkan partisipasi publik secara *real-time* lintas negara (She, 2023; Wagner et al., 2024). Kampanye seperti *Save the Arctic*, *Detox My Fashion*, serta gerakan anti-plastik menunjukkan efektivitas kombinasi antara advokasi langsung dan digital dalam menciptakan tekanan global terhadap pemerintah maupun korporasi (Wagner et al., 2024). Dengan demikian, transformasi digital Greenpeace merupakan kelanjutan dari strategi yang telah lama berkembang dan kemudian semakin diintensifkan.

Sebagai organisasi yang beroperasi di lebih dari 55 negara, Greenpeace menghadapi dinamika yang sangat beragam tergantung pada konfigurasi politik, ekonomi, dan hukum di masing-masing negara tempatnya bernaung. Karakter respons negara terhadap advokasi Greenpeace tidak semata-mata ditentukan oleh tipe rezim (demokratis versus otoriter), melainkan juga oleh sejauh mana isu lingkungan yang di advokasikan bersinggungan dengan kepentingan strategis nasional, khususnya di sektor energi dan sumber daya alam.

Di negara-negara demokrasi dengan kepentingan besar di sektor energi fosil, seperti Norwegia, Greenpeace tetap dapat beroperasi secara legal meskipun sering menghadapi hambatan di ranah hukum. Kasus *Greenpeace Nordic and Others v. Norway* yang diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) pada Oktober 2025 menjadi ilustrasi penting. Dalam putusannya, pengadilan menolak gugatan Greenpeace yang menyatakan bahwa pemberian lisensi pengeboran minyak di Arktik oleh pemerintah Norwegia pada 2016 melanggar Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (hak atas penghormatan kehidupan pribadi dan keluarga). Meskipun demikian, pengadilan untuk pertama kalinya menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban prosedural untuk melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, yaitu termasuk emisi dari pembakaran (*combustion emissions*) minyak dan gas yang diekspor, sebelum menyetujui proyek energi baru (Norges institusjon for menneskerettigheter, 2025; Debevoise & Plimpton LLP, 2025). Putusan ini menunjukkan bahwa di negara demokrasi, ruang advokasi tetap terbuka melalui jalur litigasi dan tekanan hukum, meskipun hasilnya tidak selalu menguntungkan aktivis lingkungan.

Di negara otoriter dengan ketergantungan tinggi pada ekspor energi seperti Rusia, dinamika yang terjadi jauh berbeda. Alih-alih berhadapan dengan proses hukum yang (relatif) independen, Greenpeace menghadapi serangkaian regulasi yang secara sistematis membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil, mulai dari undang-undang "agen asing" (2012) hingga penetapan sebagai "organisasi yang tidak diinginkan" (*undesirable organization*) yang berujung pada pelarangan

total pada 2023 (Zavyalova, 2025; Tysiachniouk et al., 2024). Perbedaan respons ini tidak hanya mencerminkan perbedaan sistem politik, tetapi juga menunjukkan bahwa negara dengan kepentingan strategis yang sangat tinggi di kawasan Arktik cenderung memandang advokasi lingkungan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Sementara itu, di negara otoriter lain seperti China, pendekatan terhadap organisasi lingkungan internasional cenderung lebih pragmatis. China tidak secara eksplisit melarang Greenpeace beroperasi, namun menerapkan kontrol ketat melalui regulasi yang membatasi pendanaan asing dan aktivitas advokasi. Menariknya, meskipun China menjadi salah satu penerima utama LNG dari proyek Arktik Rusia yang terkena sanksi, dimana mereka tercatat dengan menerima 22 pengiriman LNG pada 2025, termasuk 21 dari proyek Arctic LNG 2, tapi tidak terdapat catatan bahwa China secara langsung melarang aktivitas advokasi lingkungan asing selama advokasi tersebut tidak menyentuh kepentingan ekonomi strategis negara (Newsbase, 2026; bne IntelliNews, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa faktor *core interest* ekonomi seringkali lebih menentukan dibandingkan karakter rezim semata.

Dengan demikian, komparasi lintas negara ini memperkuat argumentasi bahwa kasus Rusia memiliki kekhasan tersendiri. Keunikan ini terbentuk dari kombinasi tiga faktor yang saling memperkuat, yaitu posisi Arktik sebagai kepentingan nasional yang sangat sensitif, model *state capitalism* yang mengintegrasikan kepentingan negara dan korporasi energi, serta sistem politik yang semakin represif pasca invasi Ukraina 2022. Kondisi yang tercipta dari

akumulasi ketiga faktor ini menjadikan advokasi lingkungan di Rusia tidak sekadar dihambat, tetapi secara aktif dikriminalisasi dan dieliminasi.

2.2. Greenpeace di Negara Rusia

Keberadaan Greenpeace di Rusia menunjukkan dinamika yang khas dan berbeda dibandingkan dengan operasinya di banyak negara lain, terutama karena dipengaruhi oleh konfigurasi politik domestik yang secara bertahap mempersempit ruang partisipasi publik dan membatasi aktivitas organisasi independen. Meskipun Federasi Rusia secara formal mengadopsi sistem demokrasi, praktik politik yang berkembang memperlihatkan konsolidasi kekuasaan yang semakin kuat di tangan eksekutif sejak awal kepemimpinan Vladimir Putin, yang kemudian diikuti dengan penguatan kontrol negara terhadap institusi hukum, media, serta masyarakat sipil (Stoner-Weiss, 2006; McFaul, 2021; Freedom House, 2024; Rescheto, 2025). Dalam konteks tersebut, organisasi non-pemerintah berjejaring internasional seperti Greenpeace menjadi semakin rentan terhadap pembatasan regulatif dan tekanan politik.

Akar kehadiran Greenpeace di Rusia sendiri dapat ditelusuri pada momentum liberalisasi akhir era Soviet. Pada tahun 1989, Greenpeace berhasil mendirikan kantor perwakilan pertamanya di Uni Soviet dengan memanfaatkan kebijakan *glasnost* dan *perestroika* di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev (Greenpeace, 2016; Interfax, 2012). Kebijakan ini membuka akses terhadap informasi publik dan menciptakan ruang bagi kritik terhadap isu-isu yang sebelumnya tertutup. Tragedi nuklir Chernobyl tahun 1986 menjadi katalis

penting yang mendorong meningkatnya kesadaran ekologis masyarakat sekaligus mengungkap budaya kerahasiaan negara dalam mengelola krisis lingkungan (Greenpeace, 2016; Interfax, 2012; Berls Jr, 2021; Coumel & Elie, 2013). Dalam situasi tersebut, Greenpeace hadir sebagai aktor yang menawarkan transparansi dan advokasi independen yang relevan dengan kebutuhan publik.

Memasuki era pasca-Soviet pada awal 1990-an, Greenpeace secara formal memperluas operasinya di Rusia melalui pembukaan kantor nasional di Moskow dan kemudian di St. Petersburg pada tahun 2001 (Greenpeace, 2016; Interfax, 2012). Fase ini menandai institusionalisasi Greenpeace Rusia sebagai bagian dari jaringan global Greenpeace International. Pada periode ini, Greenpeace membangun basis dukungan melalui kegiatan sukarelawan, program edukasi lingkungan, kampanye media, serta jaringan pendanaan yang juga melibatkan kontribusi domestik. Aktivitas awalnya berfokus pada pemantauan dampak lingkungan dari warisan industrialisasi Soviet, termasuk pencemaran dari industri berat, limbah radioaktif, serta degradasi ekosistem (Greenpeace, 2016; Interfax, 2012). Relevansi isu yang diangkat membuat Greenpeace memperoleh legitimasi publik yang cukup kuat.

Kegiatan awal Greenpeace Rusia mencakup pemantauan kerusakan lingkungan akibat peninggalan industri berat Soviet seperti pabrik metalurgi, kompleks nuklir militer, industri kimia, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa evaluasi risiko ekologis (Greenpeace, 2016; Interfax, 2012). Pada periode ini, Greenpeace Rusia berhasil memperoleh legitimasi positif dari publik karena isu yang diangkat sangat relevan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat, yaitu

mulai dari polusi air dan tanah, bahaya limbah radioaktif, hingga kerusakan keanekaragaman hayati (Greenpeace, 2016; Interfax, 2012). Namun seiring dengan ketegangan terkait stabilisasi politik dan ekonomi Rusia, pola hubungan antara negara dan masyarakat sipil pun mengalami perubahan drastis.

Dinamika tersebut mengalami perubahan signifikan sejak awal 2000-an seiring dengan naiknya Vladimir Putin ke tampuk kekuasaan. Pemerintah mulai membangun sentralisasi kekuasaan dan memperkuat kontrol terhadap ruang publik, dengan latar belakang kekhawatiran akan fragmentasi politik dan ancaman separatisme yang pernah terjadi pada dekade 1990-an (Hughes, 2001; Stoner-Weiss, 2006; McFaul, 2021). Dalam konteks ini, aktivitas advokasi yang sebelumnya relatif diterima mulai diposisikan dalam kerangka keamanan dan stabilitas nasional, sehingga organisasi masyarakat sipil tidak lagi dilihat sebagai mitra reformasi, melainkan sebagai entitas yang perlu diawasi secara ketat (Syofyan, 2025).

Seiring menguatnya sentralitas keamanan negara, Greenpeace Rusia semakin sering menghadapi tantangan struktural dan diskursif. Di satu sisi, aktivitasnya masih mendapat dukungan masyarakat luas melalui kampanye isu strategis seperti perlindungan hutan boreal di Siberia, yang mana merupakan wilayah yang dikenal sebagai paru-paru dunia karena kemampuan penyerap karbonnya (Islam dkk., 2024; Wagner et al., 2024). Greenpeace Rusia juga berhasil mengawal dan mengungkap kebakaran hutan skala luas, pembalakan liar yang melibatkan pejabat daerah dan perusahaan besar, serta manipulasi data resmi mengenai dampak kerusakan ekosistem di Rusia (Donner-Amnell, 2017). Tetapi,

bukti ilmiah yang dihasilkan Greenpeace Rusia sering kali bertentangan dengan narasi pemerintah Rusia. Bagi otoritas negara, praktik yang dilakukan Greenpeace ini bukan hanya kritik lingkungan, tetapi juga bentuk ketidakabsahan dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pembangunan dan kontrol informasi negara (Aitkhozhina, 2021).

Selain isu kehutanan, Greenpeace Rusia juga aktif dalam memantau sektor energi dan limbah nuklir. Hal ini dikarenakan Rusia mewarisi puluhan fasilitas nuklir tua, termasuk situs seperti Mayak di Chelyabinsk, yang selama beberapa dekade dikenal dengan catatan kebocoran radioaktif dan pencemaran air dan tanah (Christensen dkk., 1997). Greenpeace Rusia pun melakukan investigasi mengenai risiko fasilitas nuklir dan mengeluarkan laporan-laporan ilmiah yang mengungkap pencemaran bahan bakar radioaktif di sungai dan laut internasional (Greenpeace International, 2020). Dari situ Greenpeace Rusia berhasil memperkuat posisi Greenpeace Internasional sebagai aktor pusat dalam isu perlindungan keselamatan nuklir. Namun bagi negara, isu ini menyentuh inti kedaulatan strategis mereka, dikarenakan energi nuklir bukan hanya sumber listrik domestik bagi Rusia, tetapi juga merupakan pilar penting militer dan *prestise* geopolitik yang mereka miliki sebagai *bargaining* dengan negara lain terkait keamanan (Siddi & Silvan, 2024; Szulecki & Overland, 2023). Dengan kata lain, kritik Greenpeace terhadap keselamatan nuklir tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap suatu industri, tetapi sebagai tantangan terhadap simbol kekuatan negara dan fondasi keamanan nasional Rusia.

Dalam ranah industri kimia dan metalurgi, Greenpeace Rusia turut terlibat dalam mengungkap insiden pencemaran Norilsk Nickel dan tumpahan 20.000 ton diesel pada tahun 2020, yang mana merupakan salah satu bencana ekologis terbesar dalam sejarah Rusia modern (Greenpeace International, 2020). Kampanye yang Greenpeace Rusia inisiasi ini berhasil membantu mendorong proses investigasi terhadap perusahaan dan mendorong transparansi data lingkungan secara lebih luas (Greenpeace International, 2020; Sakirko et al., 2021). Akan tetapi, insiden-insiden keberhasilan terhadap perlindungan lingkungan ini semakin memperkuat kesan negara bahwa Greenpeace Rusia bertindak sebagai "pengawas eksternal" yang sering menentang kepentingan ekonomi strategis perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat. Peran "pengawas" ini, meskipun memberikan manfaat bagi transparansi publik dan perlindungan lingkungan, dipandang problematis oleh negara karena membongkar narasi resmi mengenai pengelolaan industri yang bertanggung jawab.

Pada dasarnya sejak pertengahan 2000-an, Kremlin secara semakin eksplisit membingkai organisasi asing sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Narasi ini menguat pasca terjadinya revolusi demokratis di Eropa Timur, seperti Revolusi Mawar di Georgia (2003) dan Revolusi Oranye di Ukraina (2004), yang ditafsirkan oleh elite Rusia sebagai bukti bahwa organisasi asing dapat berfungsi sebagai instrumen geopolitik Barat (Finkel & Brudny, 2012; Lawlor, 2025). Persepsi ini mempercepat pembentukan kerangka hukum yang semakin restriktif terhadap organisasi non-pemerintah.

Tabel 2.1 Isu-isu Advokasi Greenpeace Rusia

Periode / Tahun	Isu Kampanye	Bentuk Aksi dan Tujuan	Respons Pemerintah / Negara	Kategori Respons
Era Soviet (1970s-1980s)	Nuklir, Perburuan Paus	Protes terhadap uji coba nuklir & perburuan paus komersial.	Diblokir, dihalangi, dan diawasi ketat. Aktivistis dianggap sebagai agen asing pengganggu.	Penolakan/Hambatan Sistemik
2013	Minyak Arktik	Aksi damai di atas rig minyak Prirazlomnaya milik Gazprom.	Represi Langsung & Kriminalisasi: Kapal Arctic Sunrise disita, 30 aktivis ("Arctic 30") ditahan, awalnya dituduh "pembajakan" (hukuman hingga 15 tahun), lalu dikurangi menjadi "perusakan".	Represi Langsung
2020	Hutan (Yugyd Va)	Upaya melindungi Taman Nasional Yugyd Va (Situs Warisan Dunia UNESCO) dari penambangan emas.	Penolakan/Hambatan Sistemik: Kementerian Lingkungan Hidup awalnya mengizinkan penambangan. Namun, setelah tekanan publik dan kampanye, izin tersebut berhasil dibatalkan. Ini menunjukkan celah dalam sistem yang bisa dimanfaatkan.	Keberhasilan Melalui Tekanan Sosial
2020an - sekarang	Umum (Semua Isu)	Operasi organisasi dan kampanye publik.	Undang-Undang "Agen Asing": Greenpeace Rusia dimasukkan dalam daftar "agen asing", yang membatasi penerimaan pendanaan, membebani administrasi, dan mencapnya sebagai pengkhianat. Ini adalah alat sistematis untuk membatasi ruang gerak LSM.	Penolakan/Hambatan Sistemik

Sumber: (Diolah kembali oleh penulis dari Greenpeace, 2025)

Puncak dari pendekatan regulatif ini tercermin dalam pengesahan *foreign agents law* tahun 2012 No. 121-FZ yang kemudian diamandemen pada 14 Juli 2022 No. 255-FZ. Undang-undang ini mewajibkan organisasi yang menerima pendanaan asing dan terlibat dalam aktivitas yang didefinisikan secara luas sebagai "kegiatan politik" untuk mendaftarkan diri sebagai "agen asing" (Amnesty International, 2016; КонсультантПлюс, 2022; Commission on Security and Cooperation in Europe, 2024). Label tersebut membawa beban stigma historis karena dalam budaya politik Rusia istilah "agen asing" identik dengan spionase dan subversi, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme delegitimasi publik terhadap organisasi masyarakat sipil (Zavyalova, 2025). Dampaknya meliputi audit berulang, pembatasan aktivitas, hingga tekanan finansial dan reputasional (Human Rights Watch, 2018; Amnesty International, 2016).

Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 21.04.2025) "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)

Статья 1. Иностранные агенты

1. Для целей настоящего Федерального закона под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой установлены [статьей 4](#) настоящего Федерального закона.

2. Иностранным агентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового (далее - лица).

Gambar 2.3 *Foreign Agents Law* Pasal 1 tentang Agen Asing Sumber: (КонсультантПлюс, 2022)

Namun instrumen yang lebih represif kemudian hadir melalui *undesirable organizations law* No. 272-FZ pada tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung Rusia untuk menetapkan organisasi asing sebagai "tidak diinginkan" apabila dianggap mengancam tatanan konstitusional, pertahanan, atau

keamanan negara (Berdy's, 2021; Hamlett, 2017). Penetapan ini secara otomatis melarang seluruh aktivitas organisasi, membekukan aset, serta mengkriminalisasi setiap bentuk kerja sama dengan organisasi tersebut (Human Rights Watch, 2021). Dengan demikian, pendekatan negara bergeser dari sekadar pengawasan administratif menuju eksklusi dan kriminalisasi terhadap aktor non-negara.

Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"

Статья 3.1

(введена Федеральным законом от 23.05.2015 N 129-ФЗ)

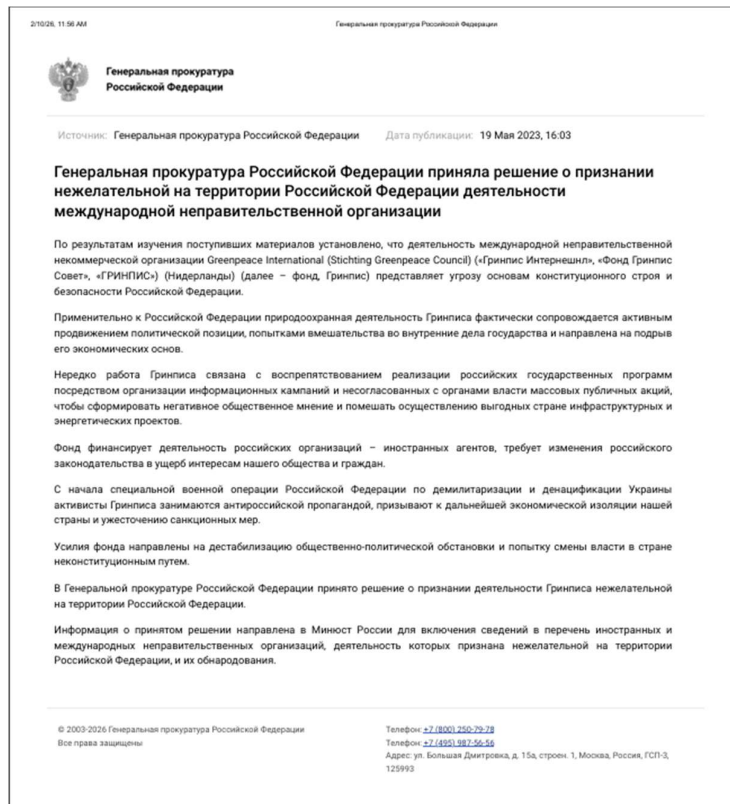
1. Деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, спискам кандидатов, избранно зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме (включая участие в иных формах в избирательных кампаниях, кампаниях референдума, за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей), может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации. Деятельность иностранной или международной неправительственной организации также может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 555-ФЗ, от 28.06.2021 N 230-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Gambar 2.4 *Undesirable Organizations Law* Pasal 3.1

Sumber: (КонсультантПлюс, 2015)

Penetapan Greenpeace sebagai *undesirable organization* oleh Kejaksaan Agung Federasi Rusia pada 19 Mei 2023 tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang organisasi lingkungan. Dalam perspektif negara, langkah ini merupakan puncak dari eskalasi konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, sekaligus cerminan dari logika keamanan nasional yang semakin dominan dalam kebijakan domestik Rusia pasca invasi ke Ukraina pada Februari 2022.



Gambar 2.5 Berita Acara Pernyataan Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia terhadap Penetapan Greenpeace sebagai *Undesirable Organization*
Sumber: (Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2023)

Secara formal, keputusan pelarangan didasarkan pada Undang-Undang No. 272-FZ tentang "Organisasi yang Tidak Diinginkan" (*Undesirable Organizations Law*) yang disahkan pada 2015. Dalam pernyataan resminya, Kejaksaan Agung Rusia menyatakan bahwa aktivitas Greenpeace "mengancam fondasi tatanan konstitusional dan keamanan Federasi Rusia" serta "disertai dengan promosi aktif posisi politik, upaya campur tangan dalam urusan internal negara, dan ditujukan untuk merusak fondasi ekonominya" (Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2023). Pernyataan ini secara eksplisit menghubungkan advokasi lingkungan dengan ancaman terhadap stabilitas

nasional, yaitu sebuah bentuk sekuritisasi isu lingkungan yang semakin menguat dalam wacana resmi pemerintah Rusia.

Namun, dibalik justifikasi formal tersebut, terdapat akar konflik yang lebih mendalam. Menurut analisis yang dipublikasikan oleh *Novaya Gazeta Europe*, hubungan antara Greenpeace dan otoritas Rusia telah memburuk secara signifikan dalam lima tahun terakhir, jauh sebelum invasi Ukraina. Pada 2017, Sergey Ivanov, yang merupakan utusan khusus Presiden Putin untuk Perlindungan Lingkungan, Ekologi, dan Transportasi, menyebut Greenpeace sebagai "organisasi ekstremis" dalam wawancara dengan *Kommersant*.

“Greenpeace является организацией экстремистского толка, заявил представитель российского президента по природоохранным вопросам Сергей Иванов.” – Sergey Ivanov (Pronedra, 2017)

Selain itu, pada 2018, Nikolay Nikolaev, ketua Komite Duma untuk Sumber Daya Alam, memerintahkan investigasi terhadap Greenpeace sebagai calon "agen asing", dan mereka terus berupaya mengulang pada 2019 dan 2020 meskipun awalnya tidak berhasil (*Novaya Gazeta Europe*, 2023).

Yang lebih penting, kritik terhadap Greenpeace semakin menguat atas dasar argumen ekonomi. Rashid Ismailov, kepala Masyarakat Ekologi Rusia (*Russian Ecological Society*), menyatakan pada April 2022 bahwa jika Greenpeace tidak didaftarkan sebagai organisasi yang tidak diinginkan, "kedaulatan lingkungan Rusia (akan) terancam." Ismailov membenarkan klaimnya dengan alasan ekonomi, menyalahkan organisasi tersebut karena menciptakan "opini publik negatif" tentang "proyek infrastruktur besar Federasi Rusia" (*Novaya Gazeta Europe*, 2023). Pernyataan ini mengungkap bagaimana kritik

lingkungan, yang seharusnya menjadi ranah diskusi kebijakan publik, justru terlihat diposisikan sebagai hambatan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Pembenaran serupa juga muncul di tingkat regional. Pada November 2022, pemerintah Oblast Chukotka mengakhiri kerja sama mereka dengan WWF Russia (yang kemudian juga ditetapkan sebagai organisasi yang tidak diinginkan pada Juni 2023) dengan pernyataan bahwa "kami menentang kolektif Barat dalam membela Tanah Air kami. Saat ini, banyak LSM [...] yang didanai oleh negara-negara yang tidak bersahabat dengan kami, membantu dalam perang informasi dan psikologis melawan Rusia" (Novaya Gazeta Europe, 2023). *Framing* ini memperlihatkan bagaimana organisasi lingkungan internasional secara sistematis dihubungkan dengan narasi geopolitik yang lebih luas, terutama setelah invasi Ukraina.

Dari perspektif negara, kawasan Arktik memiliki signifikansi yang jauh melampaui isu lingkungan biasa. Seperti dijelaskan oleh Nail Farkhatdinov, koordinator departemen analitik organisasi Arctida, pemerintah Rusia tidak melihat pencairan es Arktik akibat perubahan iklim sebagai ancaman, melainkan sebagai "peluang", yaitu peluang untuk membuka Jalur Laut Utara (*Northern Sea Route*) sepanjang tahun dan memperluas eksploitasi sumber daya energi (Greenpeace International, 2026). Dalam logika ini, advokasi Greenpeace yang menuntut moratorium pengeboran minyak di Arktik tidak hanya dianggap mengabaikan kepentingan ekonomi, tetapi juga menentang strategi jangka panjang negara untuk memanfaatkan perubahan iklim sebagai sumber keuntungan geopolitik dan ekonomi.

Lebih jauh, menurut Vladimir Sliviyak, salah satu pendiri organisasi Ecodefense yang kini tinggal di Jerman, otoritas Rusia secara terbuka menunjukkan betapa sedikitnya mereka peduli terhadap isu lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. "Pada kenyataannya, otoritas Rusia adalah musuh lingkungan global," tegas Sliviyak, seraya menambahkan bahwa Rusia secara aktif mensabotase upaya internasional untuk menyelamatkan lingkungan (DW, 2025). Pernyataan ini, meskipun berasal dari perspektif aktivis yang kritis, memperkuat gambaran bahwa pemerintah Rusia secara konsisten memprioritaskan kepentingan ekonomi dan geopolitik jangka pendek di atas pertimbangan lingkungan.

“In reality, the Russian authorities are an enemy of the global environment,” “Every year, there are more extreme events as a result of climate change — landslides, mudslides, torrential rain, drought, desertification, declining crop yields, epidemics — and these damage both the Russian state budget and the health of ordinary Russians.” – Vladimir Sliviyak (DW, 2025)

Dengan demikian, pelarangan Greenpeace pada 2023 tidak dapat dipahami sebagai kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan sebagai akumulasi dari tiga faktor yang saling memperkuat. Pertama, eskalasi konflik jangka panjang yang sudah berlangsung sejak insiden Arctic 30 pada 2013. Kedua, penguatan kerangka hukum represif melalui undang-undang "agen asing" dan "organisasi yang tidak diinginkan". Ketiga, konteks geopolitik pasca invasi Ukraina yang memungkinkan negara untuk membenarkan tindakan represif dengan dalih keamanan nasional dan perang melawan pengaruh Barat. Yang membedakan tahun 2023 dari tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa ruang untuk kompromi telah benar-benar tertutup. Sebelum invasi, Greenpeace masih diizinkan

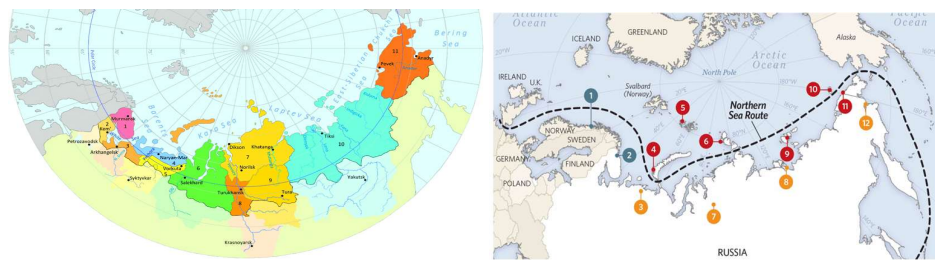
beroperasi meskipun dengan status "agen asing" yang membatasi ruang gerakannya. Namun, setelah perang dimulai, negara menerapkan pendekatan keamanan total sehingga organisasi dengan jejaring internasional tidak lagi dipandang sebagai mitra yang dapat dinegosiasikan, melainkan sebagai ancaman yang harus dihilangkan (Tysiachniouk et al., 2024; Human Rights Watch, 2023).

2.3. Konflik Kawasan Arktik Rusia

Konflik antara Greenpeace dan Rusia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menempatkan kawasan Arktik sebagai pusat kontestasi kepentingan yang mempertemukan dua perspektif yang saling bertolak belakang, yaitu perlindungan lingkungan global dan kepentingan strategis negara (Villo dkk., 2020). Meskipun pelarangan Greenpeace pada tahun 2023 dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk perang Ukraina dan meningkatnya sensitivitas negara terhadap aktor berjejaring internasional, akar konflik yang paling konsisten, intens, dan berulang justru bersumber dari advokasi Greenpeace terhadap eksploitasi energi di kawasan Arktik (Tysiachniouk et al., 2024; The Moscow Times, 2023; Meduza, 2023). Dengan kata lain, dibandingkan isu-isu advokasi lainnya seperti deforestasi, polusi industri, atau limbah nuklir, isu Arktik memiliki posisi yang jauh lebih sensitif karena secara langsung bersinggungan dengan inti kepentingan ekonomi, geopolitik, dan keamanan negara Rusia.

Secara geografis dan ekologis, kawasan Arktik memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem iklim global. Kawasan ini berfungsi sebagai regulator suhu bumi melalui keberadaan es laut, mempengaruhi sirkulasi

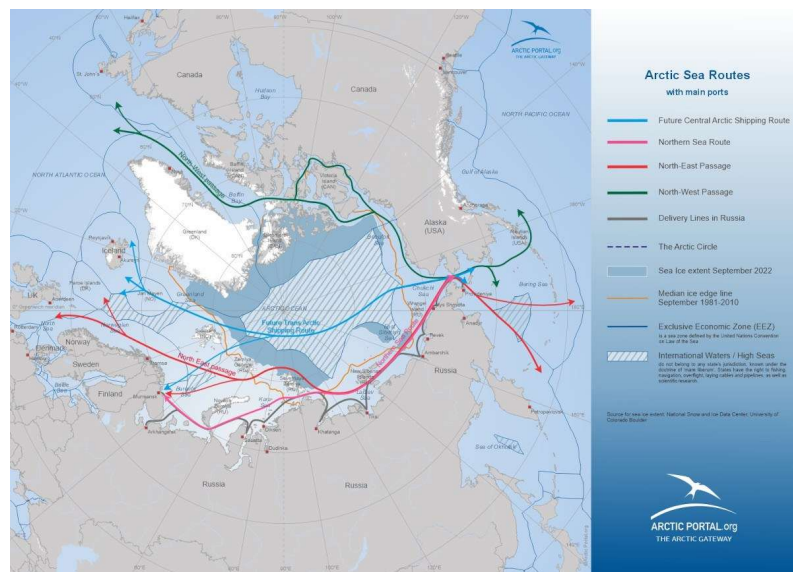
arus samudra, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies endemik yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan (IPCC, 2023; AMAP, 2021). Perubahan di Arktik memiliki dampak global, termasuk percepatan pemanasan, kenaikan permukaan laut, dan gangguan biodiversitas. Oleh karena itu, dalam perspektif Greenpeace, Arktik bukan sekadar wilayah ekologis biasa, melainkan "*frontline*" krisis iklim global yang menentukan masa depan sistem bumi (Greenpeace, 2026).



Gambar 2.6 Peta Kawasan Arktik Rusia
Sumber: (Dudarev & Odland, 2022; Bender, 2015)

Namun, yang membuat isu Arktik jauh lebih krusial dibandingkan isu advokasi lainnya terletak pada nilai strategisnya bagi Rusia. Kawasan ini mengandung cadangan besar minyak dan gas yang diproyeksikan sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional dan sumber utama pendapatan negara dalam jangka panjang (Soldatkin & Antonov, 2025). Tidak seperti isu deforestasi atau pencemaran lokal yang dampaknya relatif terbatas secara geopolitik, eksploitasi Arktik berkaitan langsung dengan posisi Rusia dalam pasar energi global serta kemampuannya mempertahankan pengaruh ekonomi di tengah tekanan sanksi internasional. Selain itu, mencairnya es Arktik membuka Jalur Laut Utara yang berpotensi menjadi rute perdagangan strategis antara Asia dan Eropa, sehingga meningkatkan nilai geopolitik kawasan ini secara signifikan (The Arctic Institute, 2022).

Lebih jauh, Arktik juga memiliki dimensi simbolik yang tidak dimiliki oleh isu advokasi lainnya. Dalam narasi negara, penguasaan dan eksploitasi Arktik diposisikan sebagai simbol kedaulatan, kekuatan teknologi, dan kontinuitas sejarah eksplorasi Rusia sejak era Soviet (Walker, 2013). Hal ini membuat setiap kritik terhadap aktivitas di kawasan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kritik kebijakan lingkungan, tetapi sebagai tantangan terhadap identitas nasional dan legitimasi negara. Inilah yang membedakan Arktik dari isu-isu lain, yaitu dimana ketika Greenpeace mengadvokasi perlindungan hutan atau pengurangan polusi, negara mungkin merespons dengan resistensi administratif, tetapi ketika advokasi menyoal Arktik, respons negara cenderung meningkat menjadi defensif dan represif karena menyentuh "*core interest*" negara.



Gambar 2.7 Arctic Sea Routes Russia Mapping
Sumber: (Arctic Portal, 2025)

Sebaliknya, Greenpeace memandang Arktik sebagai ekosistem yang sangat rentan dan tidak layak untuk dieksploitasi. Sejak awal 2000-an, organisasi ini secara sistematis membangun narasi global mengenai kerentanan Arktik

melalui riset ilmiah, ekspedisi, serta kampanye internasional seperti *Save the Arctic* (Maudy Noor Fadhlia, 2022). Dalam kerangka ini, eksploitasi hidrokarbon di Arktik diposisikan sebagai kontradiksi terhadap komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim (Greenpeace, 2026). Dibandingkan isu lain, advokasi Arktik juga memiliki dimensi global yang lebih kuat karena dampaknya melintasi batas negara dan berkaitan langsung dengan rezim iklim internasional.

Pertemuan antara dua perspektif ini menciptakan konflik yang bersifat struktural dan tidak mudah direkonsiliasi. Ketika Greenpeace menuntut moratorium pengeboran minyak di Arktik, tuntutan tersebut secara langsung berbenturan dengan proyek strategis negara yang menyangkut ekonomi, geopolitik, dan identitas nasional. Dalam konteks ini, advokasi lingkungan mengalami "*sekuritisasi*", yaitu dipindahkan dari ranah debat kebijakan publik ke ranah keamanan nasional, sehingga membuka ruang legitimasi bagi tindakan represif negara (Zavyalova, 2025; Lisina, 2023).

Ketegangan tersebut mencapai eskalasi awal yang signifikan melalui insiden *Arctic 30* pada tahun 2013. Aksi protes Greenpeace terhadap platform pengeboran *Prirazlomnaya* milik Gazprom di Laut Pechora direspons oleh pemerintah Rusia dengan dakwaan pembajakan, penahanan kapal *Arctic Sunrise*, dan pemenjaraan tiga puluh aktivis (Greenpeace International, 2015; Human Rights Watch, 2013). Dibandingkan respons terhadap isu lingkungan lainnya, reaksi negara dalam kasus ini jauh lebih keras, yang menunjukkan bahwa Arktik diperlakukan sebagai wilayah dengan sensitivitas keamanan tinggi. Insiden ini

menjadi titik balik yang menandai pergeseran dari pembatasan administratif menuju kriminalisasi langsung terhadap advokasi lingkungan.



**Gambar 2.8 Personil Keamanan Rusia terlihat mengarahkan senjata ke arah seorang aktivis Greenpeace International saat lima aktivis berusaha memanjat kapal 'Prirazlomnaya' di Laut Pechora, Rusia.
Sumber: (Greenpeace, 2024; Christensen, 2023)**

Pasca insiden tersebut, Arktik tidak hanya menjadi locus konflik, tetapi juga template bagi respons negara terhadap Greenpeace. Studi oleh Villo, Halme, & Ritvala (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks *state capitalism*, negara cenderung melihat NGO internasional sebagai ancaman ketika aktivitas mereka bersinggungan dengan sektor strategis. Memasuki tahun 2022, negara memperluas kontrol terhadap masyarakat sipil dengan memanfaatkan situasi geopolitik yang tengah terjadi sebagai legitimasi untuk memperketat pengawasan dalam negeri (Tysiachniouk et al., 2024; The Moscow Times, 2023). Hal ini pun menimbulkan munculnya retorika resmi yang menegaskan bahwa kritik domestik terhadap negara, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan energi dan lingkungan, identik dengan kolaborasi dengan negara musuh (HRW, 2025). Dalam iklim represif semacam ini, organisasi asing pun secara otomatis diposisikan sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional Rusia.

Dengan demikian, konflik Arktik berfungsi sebagai katalis yang membentuk pola framing negara, yaitu dari melihat NGO sebagai aktor sipil

menjadi aktor yang diasosiasikan dengan ancaman terhadap stabilitas nasional. Lebih jauh, dibandingkan isu advokasi lain yang bersifat sektoral, isu Arktik memiliki karakter multidimensional, karena menggabungkan aspek lingkungan, energi, militer, dan geopolitik sekaligus. Kompleksitas inilah yang menjadikannya sebagai titik benturan paling tajam antara Greenpeace dan Rusia. Ketika isu lain masih memungkinkan ruang kompromi, isu Arktik cenderung bersifat *zero-sum* karena menyangkut kepentingan strategis jangka panjang negara.

Tabel 2.2 Timeline Eskalasi Isu Arktik antara Greenpeace dan Negara Rusia (2000-an – 2023)

Fase / Tahun	Titik Kritis / Aksi Advokasi
Pra-2013	Kampanye <i>Save the Arctic</i> ; advokasi moratorium pengeboran minyak di Arktik; publikasi riset ilmiah dan ekspedisi lapangan.
2013	Insiden <i>Arctic 30</i> – aktivis Greenpeace memprotes platform pengeboran Gazprom di Laut Pechova; aksi langsung di lokasi pengeboran.
2016 - 2021	Kampanye perlindungan Danau Baikal, hutan lindung, dan isu lingkungan domestik lainnya; kritik terhadap proyek industri berskala besar.
2022	Invasi Rusia ke Ukraina; Greenpeace secara internasional menyuarakan tekanan terhadap industri energi Rusia; sikap kritis terhadap kebijakan energi negara.
2023	Akumulasi seluruh advokasi lingkungan yang dinilai melawan kepentingan strategis negara; Greenpeace Rusia terus beroperasi meski dalam tekanan.

Sumber: (Diolah kembali oleh penulis dari berbagai sumber [Villo dkk., 2020; Greenpeace International, 2015; Human Rights Watch, 2013; Tysiachniouk dkk., 2024; The Moscow Times, 2023; Meduza, 2023; Zavyalova, 2025; Lisina, 2023; dll.]

Dengan demikian, kawasan Arktik tidak hanya menjadi lokasi geografis konflik, tetapi juga pondasi struktural yang menjelaskan mengapa konflik antara Greenpeace dan Rusia berkembang secara intens dan berujung pada pelarangan organisasi tersebut. Di kawasan inilah advokasi lingkungan pertama kali dipersepsikan secara sistematis sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis

negara, dan dari sinilah pola respons represif negara terbentuk, direproduksi, dan akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2023.

2.4. Model Strategi Advokasi Greenpeace untuk Isu Arktik Sebelum Penghentian Operasional

Dinamika advokasi lingkungan di kawasan Arktik menunjukkan bahwa strategi kampanye Greenpeace tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi isu, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam membangun tekanan transnasional terhadap kebijakan negara, termasuk dalam relasinya dengan Rusia. Strategi ini mencerminkan pola advokasi yang selaras dengan konsep *transnational advocacy networks* dan *boomerang pattern* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, di mana aktor domestik yang menghadapi hambatan struktural mengalihkan tekanan ke jaringan internasional untuk kemudian "memantul kembali" ke negara target (Keck & Sikkink, 1998). Pola ini menjadi sangat relevan dalam konteks Rusia, yang merupakan negara dengan sistem politik kontrol pemerintah yang kuat, di mana ruang sipil mengalami pembatasan sistematis dan akses terhadap proses kebijakan domestik semakin tertutup (Stoner-Weiss, 2006; McFaul, 2021; Freedom House, 2024).

Dalam konteks Arktik, keberhasilan Greenpeace tidak semata ditentukan oleh kekuatan narasi moral, melainkan oleh kemampuannya mengintegrasikan berbagai pendekatan advokasi secara simultan, adaptif, dan saling menguatkan dalam satu kerangka kampanye. Sejak awal kampanye *Save the Arctic* pada tahun 2012, strategi ini telah diperkuat oleh pemanfaatan teknologi digital, yaitu seperti

media sosial, petisi daring, dan produksi konten digital yang memungkinkan mobilisasi dukungan lintas negara secara cepat dan masif (She, 2023; Maudy Noor Fadhli, 2022). Dengan demikian, bahkan sebelum pelarangan pada 2023, Greenpeace telah mengembangkan model advokasi *hibrida* yang menggabungkan kehadiran fisik di lapangan dengan jaringan kampanye digital global, menciptakan suatu "ekosistem tekanan" yang menjangkau berbagai level, mulai dari opini publik global hingga pengambil kebijakan (Greenpeace International, 2015).



**Gambar 2.9 Aksi kampanye #FreeTheArctic30 di berbagai negara
Sumber: (Christensen, 2023)**

Strategi advokasi Greenpeace dalam isu Arktik sebelum 2023 dapat diklasifikasikan ke dalam empat pendekatan utama yang bersifat komplementer, yaitu aksi langsung konfrontatif, produksi pengetahuan ilmiah, kampanye komunikasi publik, serta tekanan terhadap korporasi dan kebijakan (Villo et al., 2020; Weyler & Kovarik, 2021). Keempat pendekatan ini tidak dijalankan secara terpisah, melainkan berlangsung secara simultan dan terkoordinasi. Aksi langsung, yang merupakan ciri khas Greenpeace, diwujudkan melalui ekspedisi kapal, pendudukan platform minyak, dan intervensi simbolik yang dirancang untuk menghasilkan visual dramatis yang mampu menarik perhatian media global (Christensen, 2023). Produksi pengetahuan ilmiah berfungsi sebagai fondasi legitimasi, melalui riset mengenai dampak ekologis eksploitasi Arktik sekaligus menjadi bentuk tantangan terhadap monopoli negara dalam mendefinisikan

realitas lingkungan (Greenpeace, 2024). Kampanye komunikasi publik global mengubah isu kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami, sementara tekanan terhadap korporasi, yang meskipun memiliki keterbatasan dalam konteks Rusia, tetap menjadi bagian dari upaya advokasi kebijakan (Maudy Noor Fadhlia, 2022).



**Gambar 2.10 Kampanye *Save The Arctic* oleh aktivis Greenpeace dengan mengenakan baju beruang kutub sebagai simbol pengingat
Sumber: (Greenpeace 2014)**

Ilustrasi paling konkret dari integrasi strategi ini adalah peristiwa *Arctic 30* pada tahun 2013. Dalam satu rangkaian kampanye, Greenpeace secara simultan mengaktifkan seluruh instrumen advokasinya. Aksi langsung diwujudkan melalui pendakian aktivis ke platform pengeboran minyak Prirazlomnaya milik Gazprom di Laut Pechora, yang berfungsi sebagai pemicu perhatian global (Christensen, 2023). Aksi ini didukung oleh basis pengetahuan ilmiah mengenai dampak ekologis pengeboran di kawasan es yang rentan, sehingga memberikan legitimasi normatif terhadap tindakan tersebut. Secara paralel, Greenpeace meluncurkan kampanye global seperti *#FreeTheArctic30* melalui media sosial dan petisi daring, yang berhasil menggalang jutaan dukungan internasional (Maudy Noor Fadhlia, 2022). Pada saat yang sama, tekanan diplomatik juga diaktifkan melalui pemerintah Belanda yang membawa kasus ini ke ranah hukum internasional untuk menekan Rusia (Greenpeace International, 2015; Human Rights Watch, 2013).



**Gambar 2.11 Aksi aktivis Greenpeace Russia mendaki dan menduduki lokasi pengeboran minyak milik Rusia
Sumber: (Christensen, 2023)**

Dalam kerangka *boomerang pattern*, rangkaian strategi ini menunjukkan bagaimana Greenpeace "melewati" hambatan domestik di Rusia dengan mengaktifkan jaringan eksternal, seperti publik internasional, organisasi masyarakat sipil global, hingga aktor negara lain sebagai amplifier tekanan terhadap negara (Keck & Sikkink, 1998). Aksi langsung menciptakan visibilitas, riset ilmiah memberikan legitimasi, kampanye publik menghasilkan tekanan sosial, dan jalur diplomatik memperluas tekanan ke ranah politik internasional. Kombinasi ini menjadikan advokasi Greenpeace bersifat multidimensional dan sulit diabaikan.

Namun demikian, efektivitas pola ini sangat bergantung pada konteks politik domestik negara target. Di negara dengan ruang sipil yang relatif terbuka, strategi advokasi semacam ini dapat menghasilkan tekanan kebijakan atau membuka ruang negosiasi. Sebaliknya, dalam konteks Rusia, respons negara justru menunjukkan resistensi tinggi terhadap tekanan transnasional. Negara merespons dengan memperkuat kontrol, melakukan kriminalisasi, serta mendelegitimasi aktor advokasi, sebagaimana terlihat dalam kasus *Arctic 30* (Human Rights Watch, 2013; Meduza, 2023). Hal ini menunjukkan keterbatasan

boomerang pattern ketika berhadapan dengan negara yang memiliki kapasitas untuk mengisolasi diri dari tekanan internasional dan mengontrol narasi domestik secara ketat (Tysiachniouk et al., 2024)

Titik balik fundamental terjadi pada 19 Mei 2023, ketika Kejaksaan Agung Federasi Rusia secara resmi menetapkan Greenpeace sebagai *undesirable organization* (Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2023; The Moscow Times, 2023). Keputusan ini tidak hanya mengakhiri lebih dari tiga dekade operasi Greenpeace di Rusia, tetapi juga memaksa organisasi tersebut untuk mentransformasikan strategi advokasinya secara mendasar. Pemerintah Rusia tidak hanya menutup kantor fisik, tetapi juga memblokir akses terhadap situs Greenpeace melalui Roskomnadzor, sehingga membatasi seluruh bentuk kehadiran organisasi di ruang domestik (BBC, 2023; Novaya Gazeta Europe, 2023).

Dalam kondisi tersebut, Greenpeace tidak lagi dapat melakukan aksi langsung, mengirim aktivis ke lokasi strategis seperti rig pengeboran Prirazlomnaya, maupun melakukan pemantauan langsung terhadap proyek eksploitasi energi di Arktik. Akibatnya, strategi digital yang sebelumnya bersifat pelengkap berubah menjadi pondasi utama advokasi. Transformasi ini menunjukkan pergeseran dari model advokasi *hibrida* menuju model advokasi berbasis *Digital Transnational Advocacy Networks*, di mana Greenpeace mengandalkan penyebaran narasi global, mobilisasi publik digital, interaksi lintas negara, serta fasilitasi jaringan advokasi internasional untuk mempertahankan tekanan terhadap negara (She, 2023; Tiralongo et al., 2023).

Dengan demikian, dinamika advokasi Greenpeace di Arktik tidak hanya memperlihatkan bagaimana organisasi ini membangun tekanan global melalui integrasi strategi dan jaringan transnasional sebelum 2023, tetapi juga mengungkap bagaimana advokasi tersebut beradaptasi ketika ruang sipil domestik ditutup secara total. Integrasi antara strategi advokasi Greenpeace dan konsep *boomerang pattern* menjelaskan keberhasilan mobilisasi isu Arktik di tingkat global sekaligus menunjukkan batas-batas efektivitasnya ketika berhadapan dengan negara dengan sistem politik kontrol pemerintah yang kuat. Pada saat yang sama, pengalaman pasca-pelarangan menunjukkan bahwa advokasi transnasional tidak berhenti, melainkan bertransformasi menjadi lebih terdesentralisasi dan berbasis digital, membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam praktek advokasi lingkungan global kontemporer.